

DAFTAR PUSTAKA

- Alfasadun, Hardiningsih, P., Ratnasari, S. D., & Srimindarti, C. (2018). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa*. (2017), 978–979.
- Arifuddin, M., Safaruddin, & Falziah. (2017). Persepsi Pengelola Keuangan Desa dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa Di Kecamatan Mawasangkakabupaten Buton Tengah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *II*, 23–38. Diakses dari <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JURNALAKUNTANSIKEUANGAN/article/view/2976/2218>. Diakses tanggal 15 Mei 2019
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *I*(1), 1–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Burhan, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Chaya, A. (2015). Asas Pengelolaan Keuangan Desa. Diakses dari <https://www.keuangandes.info/2015/12/asas-pengelolaan-keuangan-desa.html>. Diakses tanggal 15 Mei 2019
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, *1*(2), 1–7. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.114>
- Hood, C. (1991). *A Public Management for All Seasons? Public Administration*, *69*(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Indrawati, N. (2010). *Penyusunan Anggaran dalam Era New Public Management : Implementasinya di Indonesia*. *10*(September), 176–193.
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2017). "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, *46*(1), 20–29. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29>
- Lasinta, Ghufuran. (2018). *Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan*. diakses dari https://www.researchgate.net/publication/329865651_Akuntabilitas_Dalam_Pengelolaan_Keuangan_Daerah_Di_Kabupaten_Banggai_Kepulauan. Diakses tanggal 23 Maret 2019

- Lembaga Administrasi Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Bogor: IPB.
- Lembaga Administrasi Negara, & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Good Governance*. Bogor: IPB.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Jurnal Akuntansi. Yogyakarta: ANDI.
- Miftahuddin. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muallidin, Isnaini. (2017). *Implementasi New Public Management (NPM) dalam Pelayanan Perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta*. (January 2015), 1–15. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33461.17128>
- Muhammad, Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Murwanto, R., Budiarmo, A., & Ramadhana, F. H. (2012). *Audit Sektor Publik Suatu pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. LPKPAP.
- Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek
- Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Keuangan Dan Aset Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
- Prakoso, Galih Novitran. (2018). *Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. A. (2017). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Jurnal Riset Manajemen*, 000(November 2016), 124–135.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Torres De Durand, E., Rafael Durand, A., Pratts Ponce De León, S., López Arzola, A., Sobrino, C., Glory González, M., & Torres Morales, R. (2015). Reframing The “Rules of the Game”: Through Governance, Transparency and Fiscal Responsibility. *Journal of Public Governance and Policy: Latin American Review*, 1(2), 1–21. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/329076027_Reframing_the_Rules_of_the_Game_Through_Governance_Transparency_and_Fiscal_Responsibility/stats. Diakses 25 Maret 2019
- Tsani, S., Ahmadov, I., & Aslanli, K. (2010). Governance, transparency and accountability in Sovereign Wealth Funds: Remarks on the assessment, rankings and benchmarks to date. *Public Finance Monitoring Center*, (March), 1–25. Diakses dari http://www.pfmc.az/attachments/373_SWF_2_Governance_26.03.pdf. Diakses tanggal 20 Maret 2019
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa